



APBN Kalbar Alami Defisit

PONTIANAK - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Imik Eko Putro mengatakan kinerja APBN provinsi ini hingga Juli 2022 mengalami defisit. Realisasi APBN Regional Kalbar hingga 31 Juli 2022 total pendapatan Rp8,14 triliun. Total belanja yang disalurkan di Kalbar Rp14,8 triliun sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp6,66 triliun. "Namun tetap menunjukkan sebuah capaian yang cukup baik karena defisit yang ada semakin terkendali sejak tahun 2018," kata Imik di Pontianak, kemarin.

DJPb mencatat rasio defisit di Kalbar sejak tahun 2018 hingga 2022 juga terus turun, dan tetap terkendali. Hingga Juli 2022 rasio defisit Kalbar berada di angka 45,02 persen. "Jauh di bawa hrasio defisit APBN Kalbar 2021 yang berada di angka 65,69 persen," ujar Imik.

Sementara rasio pendapatan terhadap belanja juga semakin meningkat dengan

ditunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio pendapatan terhadap belanja APBN Kalbar 2022 mencapai 54,98 persen, jauh di atas rasio di tahun 2018 hingga 2021 yang berada di rentang 25-34 persen.

Imik menyebutkan pencapaian pada sisi pendapatan negara disumbang oleh realisasi dari penerimaan perpajakan hingga akhir Juli 2022 telah mencapai Rp7,55 triliun atau sekitar 71,46 persen dari target yang ditetapkan.

Sektor perpajakan, khususnya PPh dan PPN masih menjadi penyumbang terbesar dalam porsi penerimaan negara lingkup regional Kalbar. Selain penerimaan perpajakan, realisasi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menyumbang sebesar Rp587,72 miliar atau sebesar 69,97 persen dari total target.

Sementara pada sisi Belanja, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sampai dengan 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp4,67 triliun atau

sekitar 44,44 persen dari pagu belanja, serta realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp10,14 triliun atau sekitar 54,46 persen dari total pagu yang ditetapkan.

Berdasarkan data, sampai dengan 31 Juli 2022, Belanja Modal K/L lingkup Kalbar baru terealisasi sebesar 22,67 persen atau sebesar Rp594,95 miliar dari total pagu Rp2,62 triliun, sementara realisasi DAK Fisik masih sebesar 22,13 persen atau sebesar Rp368,28 miliar dari total pagu Rp1,66 triliun.

"Ini mengindikasikan masih perlu perhatian khusus pada sisi penyaluran sampai menjadi output bahkan tercapainya outcome sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk Kementerian Keuangan Kalbar, khususnya Ditjen Perbendaharaan (DJPb), dalam mengawal pelaksanaan APBN di daerah dan memastikan setiap rupiah terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Imik. (mse)